

ABSTRAK

Pada dasarnya Mantan Narapidana Korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mempunyai hak dipilih maupun memilih yang sama dalam keberlangsungan kehidupan bernegara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris. Analisa bahan hukum empiris dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis serta data yang diperoleh dari para responden yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan, diolah menjadi data informasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa Partai Politik di Kabupaten Bangkalan sudah taat dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 sesuai dengan tanggal dikeluarkannya SK Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kata kunci: Ketaatan, Partai Politik,

ABSTRACT

Basically, Former Corruption Prisoners, drug dealers, and sexual crimes against children have the same right to choose and to be chosen in life between unity communities.

The method used in this study is Empirical. Analysis of empirical legal materials is carried out by reviewing written legal materials and data obtained from respondents which will be discussed, processed into information data.

Based on the discussion, it was concluded that Political Parties in Bangkalan District had obeyed the implementation of the Supreme Court Decision No. 46 P / HUM / 2018 in accordance with the date of issuance of Decree on Announcement of Permanent Candidate List of Bangkalan Regency DPRD Members in the 2019 General Election.

Keywords: Obedience, Political Parties,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	11
 BAB II KETAATAN PARTAI POLITIK DAN PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018.....	17
2.1 Pengertian Ketaatan	17
2.2 Partai Politik	18
2.2.1 Pengertian Partai Politik	19
2.2.2 Tujuan Partai Politik	21
2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P /HUM/2018	23
2.3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	24
2.3.2 Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam	
Memutus Perkara.....	29
2.3.3 Petitum.....	31
2.3.4 Amar Putusan	32
 BAB III KETAATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN	
BANGKALAN DALAM MENJALANKAN PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018	34
3 Ketaatan Partai Politik Di Kabupaten Bnagkalan Dalam	
Menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018	
.....	34
 BAB IV PENUTUP	 54
4.1 Kesimpulan	54

4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
BIODATA PENULIS	58

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Sebelumnya Membahas Tentang Mantan Narapidana.....	9
2. Daftar Partai politik yang dijadikan sampel	35
3. Jumlah Calon Anggota Legislatif dari Setiap Partai Politik	37